



Pemkot Jogja Tak Terapkan WFH

Seluruh ASN Wajib Masuk Kerja Mulai Hari Ini

JOGJA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengeluarkan surat edaran Nomor 01 Tahun 2024 yang memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi tertentu untuk bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) pada 16-17 April ini.

Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari manajemen arus balik Lebaran 1445 Hijriah. Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja tidak menerapkan WFH bagi ASN di lingkungan pemkot paska libur Lebaran 2024 ini. Praktis seluruh ASN tetap masuk bekerja mulai hari ini. "Ka-

mi sudah merencanakan besok (hari ini, Red) mulai masuk kerja," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Singgih Raharjo, kemarin (15/4).

Singgih justru menyambut baik aturan dari Menteri PANRB tersebut. Sebab dengan diberlakukannya WFH bagi ASN memberikan kesempatan bagi mereka yang sedang berwisata di Kota Jogja untuk memperpanjang liburannya. Sehingga memberikan kontribusi untuk menambah lama tinggal wisatawan yang notabene ASN menjadi lebih lama.

Singgih yang juga masih menjabat kepala Dinas Pariwisata DIJ itu menyebut, dengan memperpanjang lama tinggal maha berdampak pula pada belanja wisatawan yang semakin besar. Sehingga memberikan efek positif bagi pendapatan asli daerah Kota Jogja khususnya. "Ya, tentunya mem-

belanjakan di Jogja dan ini juga akan berpengaruh terhadap kepadatan lalu lintas di jalan. Saya berharap ini akan dimanfaatkan oleh para pemudik ASN yang tujuan mudiknya di Kota Jogja," tambahnya.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Baharuddin Kamba berharap pengaturan WFH dan Work from Office (WFO) ini jika diterapkan dengan tetap mengutamakan pelayanan publik. "Artinya, jangan sampai kebijakan ini mengganggu pelayanan publik dikarenakan karyawan atau ASN belum masuk kantor. Atau sedang WFH bahkan masih mudik," harapnya.

Dalam rangka memastikan pelayanan publik di kompleks Balaikota Timoho Jogja berjalan normal pasca libur Lebaran, Forpi akan melakukan pemantauan di

sejumlah kantor OPD, serta disejumlah kantor Kalurahan maupun Kemantren di Kota Jogja besok Selasa (16/4) dan Rabu (17/4).

Apabila masyarakat Kota Jogja mendapatkan atau menemukan layanan yang kurang optimal bahkan diskriminasi dapat diadukan ke Kantor Forpi Kota Jogja. "Harapannya pelayanan terhadap publik paska libur Lebaran tetap berjalan optimal seperti biasanya. Termasuk kepatuhan dan kedisiplinan ASN setelah libur Lebaran harus tetap dijaga kecuali ada yang memang sakit maupun cuti melahirkan," katanya.

Kamba menjelaskan, aturan yang tertuang dalam edaran Menteri PANRB tersebut antara lain untuk

instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen.

Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing.

Instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi, dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar. (**wia/din/hep**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005